

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abas, M., et al, *Pengantar Hukum Bisnis (Pengetahuan Dasar-Dasar Hukum Bisnis di Indonesia)*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Anandya, Diky, Ramadhana, Kurnia, dan Easter, Lalola, *Mendudukan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgment Rule dalam Perkara Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2023.
- Arsyad, Jawade Hafidz, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Asyhadie, Zaeni dan Sutrisno, Budi, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Atmadja, I Dewa Gede dan Budiarta, I Nyoman Putu, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.
- Boen, Hendra Setiawan, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008.
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, St. Paul, 2014.
- Hadjon, Philippus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hartini, Rahayu, *BUMN PERSERO (KONSEP KEUANGAN NEGARA DAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA)*, Setara Press, Jakarta, 2018.
- Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

- Husen, La Ode, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR, DPD, BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2005.
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Pengadaan Barang/Jasa pada BUMN*, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Jakarta, 2021.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.)*, Sage Publications, Inc., California, 1994.
- Nasution, Bismar, *Prinsip Good Corporate Governance pada Perseroan*, USU Press, Medan, 2009.
- Pramono, Nindyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo, Bandung, 2015.
- Prasetyo, *Dilema BUMN: Benturan Penetapan Business Judgment Rule (BJR) dengan Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rahardjo, Handri, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Rifai, Ahmad, et al, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022.
- Riyanto, Agus, *Hukum Bisnis Indonesia*, CV Batam Publisher, Batam, 2018.
- Sjawie, Hasbullah F., *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013.
- Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Setara Press, Malang, 2015.
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014.
- Zulmawan, Wawan, *Aturan Penilaian Bisnis BUMN*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021.
- \_\_\_\_\_, *Best Value for Money: Pengadaan Barang/Jasa BUMN*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3874; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.01/8/6/1//ADP/UT/PI.II-2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5124 K/Pid.Sus/2022.

### **Jurnal Ilmiah**

- Akram, Muhamad Hafizh dan Fanaro, Nisriina Primadani, Implementasi Doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia, *Ganesha Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Darmawangsa, Williem, Interpretasi yang Salah Mengenai *Business Judgment Rule* pada Substansi dan Struktur Hukum di Indonesia, *UNES Law Review*, Vol. 5 No. 3, 2023.

- Edbert, Felicia dan Sitabuana, Tundjung Herning, Keuangan Negara dan Kerugian Negara di Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi, *Prosiding Seri Seminar Nasional (SERINA)*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Fitriyanti, Fina Puspita, Teori Sumber vs Teori Badan Hukum dan Teori Transformasi Keuangan dalam Menafsirkan Status Hukum Keuangan Badan Usaha Milik Negara, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 8, 2022.
- Hadi, Shigeke Desiputri, Prinsip *Business Judgement Rule* dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN yang Melakukan Tindakan Investasi yang Mengakibatkan Kerugian, *Acta Diurnal*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Isfardiyana, Siti Hapsah, *Business Judgement Rule* oleh Direksi Perseroan, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2017.
- Jamillah, Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia, *Mercatoria*, Vol. 8 No. 2, 2015.
- Juliani, Henny, Kedudukan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 No. 3, 2015.
- Kasim, Helmi, Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 2, 2017.
- Khairandy, Ridwan, Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20 No. 1, 2013.
- Lestari, Sartika Nada, *Business Judgment Rule* Sebagai *Immunity Doctrine* Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, *Notarius*, Vol. 8 No. 2, 2015.
- Maryam, Rika, Tanggung Jawab Direksi Persero Pada Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN dalam Hal Terjadi Kerugian, *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 2 No. 1, 2023.
- Viernia, Keke, Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, *Tulisan Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, 2019.
- Wati, Dwi Ananda Fajar, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara Pada BUMN/Persero, *Badamai Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2016.

### **Media Online**

- Apriyandi, Ryan, 01 Desember 2022, Perbedaan Badan Usaha Badan Hukum dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum, <https://prolegal.id/perbedaan-badan->

[usaha-badan-hukum-dan-badan-usaha-bukan-badan-hukum/](#), 10 Oktober 2023.

Hardiyan, Yodie, 23 Desember 2015, RJ Lino Diberhentikan dari Jabatan Direktur Utama Pelindo II, <https://finansial.bisnis.com/read/20151223/309/504655/rj-lino-diberhentikan-dari-jabatan-direktur-utama-pelindo-ii>, 07 Maret 2024.

Indonesia Corruption Watch, 06 Juni 2023, Mendudukkan Kembali Implementasi Prinsip *Business Judgement Rule* dalam Perkara Korupsi, <https://antikorupsi.org/id/mendudukkan-kembali-implementasi-prinsip-business-judgement-rule-dalam-perkara-korupsi>, 15 Januari 2024.

Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Sejarah Pelindo, <https://www.pelindo.co.id/page/sejarah-pelindo>, 07 Maret 2024.

Pratama, Aprilandika, 15 Desember 2021, Kasus RJ Lino: Kerugian Negara Dihitung oleh Accounting Forensic KPK, <https://kumparan.com/kumparannews/kasus-rj-lino-kerugian-negara-dihitung-oleh-accounting-forensic-kpk-1x79z2JQTq2/full>, 05 September 2023.

Rachmadi, 27 Maret 2019, BUMN, BLU, PTNBH, dan Lembaga Sui Generis, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-aceh/baca-artikel/12783/BUMN-BLU-PTNBH-dan-Lembaga-Sui-Generis.html>, 15 Januari 2024.

